

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemahaman mengenai jurnalisme bencana pada umumnya sudah dipahami dengan baik oleh para jurnalis saat ini, tetapi dalam hal penerapan, jurnalis seringkali dirasa abai dalam menerapkan jurnalisme bencana dengan baik juga (Pertiwi, 2012). Penerapan jurnalisme bencana yang masih minim terjadi karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas tentang pemberitaan bencana oleh lembaga pers di Indonesia (Sumayya, 2013), sehingga banyak para jurnalis yang turun ke lapangan tanpa persiapan yang benar-benar matang. Seperti yang terjadi saat gempa di Mentawai, salah satu wartawan lokal menjadi korban, hal ini disebabkan kondisi transportasi yang kurang memadai, tetapi karena tuntutan profesi dan rasa kemanusiaan, wartawan tersebut turun ke lokasi bencana, sehingga dalam perjalanan kapal yang dinaikinya pecah saat berada di lautan. Arif (dalam Shoffiyah, 2020) mengatakan meski jurnalis identik dengan tantangan dan adrenalin yang terpacu, tugas seorang jurnalis pada dasarnya adalah memproduksi berita, serta menyampaikannya kepada masyarakat luas tentang kebenaran sebuah informasi, sehingga keamanan jurnalis saat liputan jauh lebih penting daripada harga pesan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada khalayak.

Pembekalan para jurnalis tentang tanggap darurat bencana, kondisi medan, dan hal lain yang berkaitan dengan ilmu kebencanaan juga masih minim diberikan kepada para wartawan, terkhususnya wartawan muda yang baru terjun ke dunia

jurnalis, padahal itu merupakan poin penting dalam persiapan menghadapi bencana kedepannya untuk meminimalisir risiko saat bertugas. Pengalaman salah satu jurnalis lokal Sumatera Barat yang saat itu baru bergabung dalam dunia jurnalis mengatakan, bahwa dia hanya dibekali ilmu dasar jurnalistik saja dan tidak dibekali ilmu terkait tanggap bencana, padahal jurnalis tersebut turut meliput salah satu bencana yang terjadi saat itu, dalam bukunya Arif tentang Jurnalisme Bencana mengatakan saat liputan banyak jurnalis muda yang minim pengalaman menghadapi bencana tanpa persiapan fisik dan mental yang memadai saat turun ke lokasi bencana.

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana juga penting oleh media bersama para jurnalisnya guna meminimalisir resiko. Arif menjelaskan tentang pengalaman meliput tsunami di Aceh, perlengkapan peliputan yang dibawa wartawan media Indonesia sangat minim dibandingkan media asing. Arif mengaku saat itu hanya membawa kamera, laptop dan telepon GSM yang bahkan tidak bisa digunakan karena sinyal mati, sementara wartawan dari stasiun televisi Australia diberi peralatan satelit, makanan, obat-obatan yang jauh lebih baik, peralatan medis, air, generator listrik dan peralatan lainnya, mengingat situasi di lokasi bencana.

Jurnalisme bencana dalam praktiknya di Indonesia salah satunya di Sumatera Barat dapat dikatakan bahwa, belum adanya keseimbangan antara idealisme dengan realitas jurnalisme bencana saat di lapangan, seperti yang ditemukan dalam penelitian terdahulu banyak dari jurnalis mengatakan bahwa keselamatan pribadi adalah hal terpenting yang harus didahulukan, tetapi pada praktiknya para jurnalis

yang bertugas tidak dibekali ilmu serta peralatan yang cukup, hanya bermodalkan peralatan liputan pada umumnya. Hal dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Pertiwi (2012) dimana hasil penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa realitas jurnalisme bencana sebagaimana disampaikan oleh media cukup menggambarkan idealnya sebuah berita bencana, namun dibandingkan praktik kerja di Lapangan, jurnalis masih jauh dari ideal yang mereka ungkapkan dalam praktiknya.

Kurangnya penerapan yang dilakukan jurnalis saat liputan dapat kita lihat dari hasil penelitian terkait jurnalisme bencana oleh Husna (2020) dalam penelitian ini Husna diperoleh hasil bahwa pada tahap persiapan jurnalis yang diteliti oleh Husna masih belum melakukan persiapan dengan baik. Kurangnya tugas khusus bagi wartawan yang meliput bencana membuat wartawan tidak siap ketika mereka ingin meliput berita bencana. Selain itu, media terkait tidak memiliki pelatihan khusus dalam pemberitaan bencana, sehingga wartawan hanya menerima informasi, terlepas dari pengalaman mereka di lapangan.

Jurnalisme bencana didefinisikan sebagai bagaimana media memberitakan bencana yang mengacu pada segi proses dan hasil berita, hal ini juga disampaikan Nazaruddin (2007:164) bahwa mengandung dua aspek, yaitu aspek proses dan hasil, ukuran proses mengacu pada proses pembuatannya, sedangkan ukuran hasil mengacu pada informasi yang dipublikasikan media. Prajarto (2008:10) dalam jurnalnya juga mengemukakan bahwa jurnalis mempunyai tanggung jawab menghimpun hingga menyajikan masalah mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan perbaikan.

Berdasarkan temuan peneliti, masih ada jurnalis yang kurang memahami konsep jurnalisme bencana yang bercirikan pemberitaan dramatis, padahal mereka tahu bahwa peristiwa bencana seharusnya diberitakan secara relatif dan tidak didramatisasi, tetapi karena beberapa faktor idealitas yang seharusnya, tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti yang disampaikan Pertiwi (2012: 108) yang membuat peliputan bencana secara konseptual tidak konsisten adalah ketika jurnalis memahami dan menyadari bahwa pemberitaan tanpa naskah satu media akan kalah dengan media lain atau akan mendapat tekanan dari beberapa pihak. Namun sejauh ini, tren liputan bencana yang dramatis, tidak akurat, tidak lengkap, dan langka terus berlanjut. Ini sudah menjadi tren, yang sayangnya tidak sesuai dengan konsep jurnalisme bencana (Pertiwi, 2012:9).

Berdasarkan temuan peneliti media juga mengabaikan proses pemberitaan yang sesuai untuk setiap prinsip dan fase, yaitu; Prinsip Akurasi, Prinsip Kemanusiaan (Human Elements), Prinsip Suara Korban, berisi harapan, keinginan dan cerita yang terabaikan media juga mengabaikan proses pemberitaan yang sesuai untuk tiap prinsip dan fasenya, yaitu; Prinsip Akurasi, Prinsip Kemanusiaan (*human elements*), Prinsip Suara Korban yang berisi harapan, keinginan dan cerita yang dilalui. Kemudian Yusuf (2006) mengatakan ada tiga fase pemberitaan bencana, pertama prabencana guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, yang kedua fase bencana guna meminimalisir isu-isu yang tersebar agar tidak membuat masyarakat khawatir, dan yang ketiga fase pasca bencana sebagai salah satu *early warning system* bagi masyarakat, guna mempercepat upaya pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi korban, tetapi pada

pasca bencana Yusuf (dalam Sumayya, 2013) mengatakan fase ini sering diabaikan oleh media, dengan pemberitaan tentang peringatan dini, pencegahan, metode evakuasi dan mobilisasi massa hanya setelah bencana terjadi.

Pemberitaan bencana menurut Lukmantoro (dalam Pertiwi:2012) masih adanya simplifikasi fakta terkait penamaan kejadian bencana seperti “Gempa Padang”, “Tsunami Aceh” dan “Gempa Yogyakarta” padahal penamaan tempat hanya berdasarkan popularitas dan kedekatan sehingga akurasi terkesan terabaikan, misalnya gempa berpusat di daerah Bantul tetapi daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah terkena dampak., namun dalam kasus seperti ini media hanya menyebut gempa Yogya sebagai strategi pemberitaan untuk menyadarkan masyarakat akan kedekatan suatu tempat populer. .

Saat peliputan bencana berlangsung tidak jarang jurnalis berada dalam situasi dilema karena harus menjalankan tuntutan profesi yang beriringan dengan munculnya rasa kemanusiaan untuk para korban bencana, dan disisi lain ada risiko yang ditanggung jurnalis apabila melakukan hal bertentangan dengan kondisi lapangan, seperti mengesampingkan keselamatan pribadinya, sehingga penerapan jurnalisme bencana yang ideal tidak terlaksana dengan baik pada akhirnya. Hal ini disampaikan Husna (2020: 2) bahwa bencana bisa dibidang merupakan topik yang “seksi” di media karena informasi bencana merupakan hal yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat luas, sehingga banyak media berlomba-lomba untuk memberitakan bencana tanpa peduli resiko dan persiapan yang matang.

Sejarawan Amerika pada 17 Oktober 1994, Paul Johnson berpidato di Pusat Konferensi Wohlstetter di Washington, AS, di mana Paul mengatakan bahwa

jurnalis amatir dan profesional sering melakukan kesalahan dalam aktivitas jurnalistik, hal terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja, oleh karena itu munculah ungkapan "dosa media". Dosa media yang dimaksud oleh Paul Johnson antara lain pemalsuan informasi, dramatisasi fakta, pelanggaran privasi, pembunuhan karakter, peracunan pikiran anak-anak dan penyalahgunaan kekuasaan.

Istilah dosa-dosa media kemudian dikerucutkan oleh Arif (2010:123) terkait dengan peliputan bencana, dosa-dosa media tersebut dibagi melalui tiga tahap dimulai dari prabencana, bencana, dan pasca bencana. Hal ini terlihat dari hasil pemberitaan di mana banyak media yang nyaris tidak melaporkan kondisi korban bencana pada tahap pascabencana dan pemulihan, seharusnya rekonstruksi dan pemulihan harus ditonjolkan media, untuk mengedukasi korban dalam bertahan hidup dan memprediksi bencana selanjutnya.

Proses pemberitaan mengenai bencana saat ini umumnya hanya memandang bencana sebagai sebuah peristiwa, berdasarkan pengalaman Arif (2010) dalam peliputan tsunami Aceh, informasi yang beredar lebih banyak berisi tentang tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana atau analisis ilmiah tentang penyebab bencana, bahkan jika mereka yang terkena dampak sebagian besar seolah-olah tidak mendapat informasi mengenai petunjuk untuk menangani bencana tersebut, masalah yang mereka miliki, dan termasuk di mana mencari makanan.

Sejak kebebasan pers diterapkan pada era reformasi 1998 Shoffiyah (2018:2) mengatakan media mulai bersaing secara ketat, sehingga sulit

menjalankan fungsinya secara profesional. Banyak dari media mengutamakan kepentingan pasar dibanding menerapkan fungsinya secara ideal. Jurnalis memiliki kebebasan untuk menyusun dan menceritakan beragam peristiwa kedalam bentuk berita. Tanpa adanya kebebasan jurnalis akan sulit bekerja. Sebaliknya, kebebasan saja tanpa adanya tanggung jawab akan mudah terjerumus kedalam praktek jurnalis yang kotor.

Wartawan Indonesia harus menerapkan cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Wartawan yang memiliki pemahaman tentang jurnalisme bencana akan mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyajikan berita dan akan menghindari penyajian berita yang bersifat mendramatisir.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, terkait pemahaman jurnalis yang tidak beriringan dengan penerapan yang dilakukan, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan jurnalisme bencana di media lokal Sumatera Barat, dalam hal ini peneliti memilih media berita Radio Classy FM Padang. Dalam penelitian dengan judul **“Penerapan Jurnalisme Bencana dalam Praktik Jurnalistik pada Media Radio Classy FM Kota Padang”**.

Penelitian mengenai penerapan jurnalisme bencana pada umumnya lebih berfokus pada media televisi dan media cetak yang menggunakan visual saat memberikan sebuah informasi bencana, dan pada dasarnya salah satu kritik mendasar dalam penerapan jurnalisme bencana yang berkaitan dengan etika berkaitan dengan gambar/foto, sedangkan pada penelitian kali ini radio menjadi media yang diteliti, radio dipilih karena minimnya topik jurnalisme bencana yang

membahas media radio, serta dalam penerepannya radio lebih mengutamakan audio serta suara-suara positif yang disampaikan dan didengar oleh masyarakat luas terutama korban bencana agar dipahami oleh para pendengarnya. Pesan-pesan yang disampaikan juga dapat didengarkan langsung oleh masyarakat luas, dalam penyampaian informasi radio juga lebih minim gangguan karena masih dapat beroperasi apabila koneksi sekitar tidak berjalan akibat bencana, seperti yang terjadi saat gempa pada tahun 2009, diaman radio menjadi satu-satunya media yang aktif memberikan informasi dan edukasi bagi korban ataupun masyarakat luas.

Radio Classy FM Padang dipilih karena merupakan satu-satunya Radio di Indonesia memiliki *tagline* sebagai Radio Cerdas Bencana di Sumatera Barat, bermula saat terjadinya gempa pada tahun 2009 dengan kekuatan 7,6 SR yang menelan banyak korban, saat itu radio menjadi satu-satunya media yang masih berfungsi, diantara 2 radio yang berfungsi, Classy FM menjadi radio yang paling aktif dalam memberitakan kejadian gempa saat itu, hingga saat ini radio Classy FM telah mendeklarasikan diri sebagai Radio Cerdas Bencana yang selalu mengutamakan pemberitaan dan memberikan edukasi bencana kepada pendengarnya

Radio Classy FM selama mengudara telah meraih beragam penghargaan diantaranya, merupakan salah satu dari tiga Radio Terbaik Sumatera Barat yang diraih pada tahun 2008 diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, lalu Classy mendapatkan sertifikat platinum dalam Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) Award (ICA) pada tahun 2011 dan 2014 sebagai

Radio Siaga Bencana, dan pada tahun 2019 Classy FM mendapatkan Certificate of Achievement kategori Berita Radio dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, dan masih banyak lagi penghargaan yang diraih oleh Classy FM selama berkontribusi di dunia jurnalistik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti berikan adalah **“Bagaimana penerapan jurnalisme bencana dalam praktik jurnalistik pada media Radio Classy FM Padang”**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemahaman jurnalis tentang jurnalisme bencana di Radio Classy FM kota Padang.
2. Menjelaskan penerapan jurnalisme bencana dalam praktik jurnalistik mengenai prinsip dan fase liputan bencana di Radio Classy FM Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep kajian ilmu komunikasi khususnya bidang jurnalistik tentang jurnalisme bencana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana media lokal Sumatera Barat mengemas beritanya agar

layak dikonsumsi masyarakat luas dan bagaimana para wartawan lokal menerapkan jurnalisme bencana. Studi ini dapat menjadi sumber referensi tambahan yang bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat, khususnya pembaca terhadap kajian jurnalisme bencana dan bagaimana media lokal Sumatera Barat terutama Radio Classy FM Padang mengelola berita terkait bencana dengan tetap berpegang pada ketentuan yang ada.

